

Dampak Sosial Pembangunan Pelabuhan Patimban pada Proses Alih Fungsi Lahan dan Keberlanjutan Mata Pencarian Petani Sekitar

Irfan Hudori

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia
Jl. Prof. Dr. Selo Soemardjan Depok, Jawa Barat 16424, Indonesia
E-mail: irfanhudori@gmail.com

Diterima: 13 April 2020, disetujui: 4 Mei 2021, diterbitkan online: 31 Desember 2021

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak sosial pembangunan Pelabuhan Patimban pada proses alih fungsi lahan dan keberlanjutan mata pencarian penduduk sekitar, khususnya yang berprofesi sebagai petani. Rencana pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban seluas +372,02 Ha untuk kawasan *backup area* dan jalan akses pelabuhan, mengalihfungsikan lahan pertanian dan tambak yang berdampak pada keberlanjutan mata pencarian petani tanaman pangan, petani tambak, dan buruh tani. Kajian terdahulu pada dokumen rencana pembebasan lahan Pelabuhan Patimban fokus membahas refleksi masyarakat petani terhadap proyek pembangunan dan kurang mengkaji upaya keberlanjutan mata pencarian petani yang terdampak alih fungsi lahan. Dengan menggunakan data penelitian kualitatif berupa hasil wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, proses alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban dapat diketahui berdasarkan konsep struktur, kultur, dan proses yang berdampak sosial pada keberlanjutan mata pencarian para petani di sekitarnya. Implementasi proses pengadaan lahan membuat pemanfaatan hasil ganti rugi mengarah ke hal-hal konsumtif dan menurunkan produktivitas petani. Penerapan program pemulihan mata pencarian (*livelihood resources program*) dapat memberikan dampak pada keberlanjutan mata pencarian masyarakat petani kedepannya.

Kata kunci: Dampak sosial, alih fungsi lahan, pembangunan, pelabuhan, mata pencarian, masyarakat.

Abstract

The Social Impact of Patimban Port Development on the Process of Land Use Change and the Sustainability of Livelihoods of Local Farmers: This research examined the social impact of Patimban Port development on the process of land use change and the sustainability of the livelihoods of the surrounding population, especially those who work as farmers. Planned land acquisition for the development of Patimban Port covering an area of +372.02 Ha for the backup area and port access road, converting agricultural land and ponds which have an impact on the sustainability of the livelihoods of food crop farmers, aquaculture farmers, and farm laborers. Previous studies on the Patimban Port land acquisition plan document focused on discussing the reflection of the farmer community on development projects and did not review efforts to sustain the livelihoods of farmers affected by the land conversion. By using qualitative research data in the form of the results of in-depth interviews, observation, and documentation, the process of land use change of the Patimban Port development can be seen based on the concept of structure, culture, and processes that have a social impact on the sustainability of the livelihoods of the surrounding farmers. Implementation of the land acquisition process makes the use of compensation lead to consumptive matters and reduce farmers' productivity. The implementation of the livelihood resources program can have an impact on the sustainability of the livelihoods of the farming community in the future.

Keywords: Social impact, land use change, development, ports, livelihoods, community.

1. Pendahuluan

Pembangunan adalah proses perubahan dari tradisional menuju ke arah yang moderen, dari masyarakat yang statis menuju masyarakat yang lebih dinamis [1]. Pada hakikatnya, ada tiga domain dalam pembangunan, yaitu domain ekonomi, sosial, dan ekologi [2]. Pendekatan pembangunan yang terlalu menekankan pada pencapaian kemajuan ekonomi secara makro tanpa memperhatikan pemerataan telah banyak mengalami kegagalan [3]. Pembangunan pelabuhan merupakan embrio pembangunan perekonomian di suatu daerah [4].

Pembangunan Pelabuhan Patimban diinisiasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional [5], Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional [6], dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 190 Tahun 2016 tentang Penetapan Dokumen Pra (*Fisibility Study*) FS dan FS Pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat [7]. Pada Dokumen Rencana Pembebasan Lahan Pelabuhan Patimban, pembangunan *backup area* pelabuhan dan jalan akses

memiliki dampak potensial terhadap alih fungsi lahan daratan seluas +372,02 Ha [8]. Kondisi tersebut dilakukan dengan mengalihfungsikan lahan pertanian, tambak, dan pesisir [8]. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Subang Tahun 2018, jumlah penduduk Desa Patimban adalah 6.950 jiwa [9]. Jenis mata pencaharian penduduk di Desa Patimban seperti buruh tani sebanyak 1.387 jiwa, petani tanaman pangan sebanyak 359 jiwa, dan perikanan sebanyak 12 jiwa [9] merupakan pihak yang paling merasakan dampak alih fungsi lahan [10].

Alih fungsi lahan merupakan akibat adanya peningkatan jumlah aktivitas penduduk dan aktivitas pembangunan [11] sehingga terjadi konversi lahan pertanian ke non-pertanian [12]. Alih fungsi lahan untuk pembangunan mengubah status kepemilikan dan penguasaan lahan, serta berimplikasi pada perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat [13]. Salah satu dampak sosial yang akan timbul akibat proses alih fungsi lahan pertanian dan tambak untuk pembangunan Pelabuhan Patimban adalah keberlanjutan mata pencaharian para petani. Penelitian yang telah dilakukan [14] menjelaskan bahwa terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-pertanian. Ditinjau dari aspek sosial, alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pelabuhan yang mendukung industrialisasi [15] diperkirakan akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur sosial. Sedangkan dari aspek budaya, alih fungsi lahan diperkirakan akan menimbulkan perubahan nilai-nilai serta pola gaya hidup (*life style pattern*) pada masyarakat tersebut [13].

Dampak tersebut dapat diminimalisir dengan membuat perencanaan yang matang dan tindakan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses alih fungsi lahan pertanian dan tambak menjadi kawasan pelabuhan dan dampak sosialnya terhadap keberlanjutan mata pencaharian para petani. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi, proses alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban dapat diketahui berdasarkan konsep struktur, kultur, dan proses yang berdampak sosial pada keberlanjutan mata pencaharian petani di sekitarnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka disusun pertanyaan penelitian yaitu mengapa proses alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban berdampak pada keberlanjutan mata pencaharian petani di sekitarnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberlanjutan mata pencaharian petani di sekitarnya, dan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian petani yang terkena dampak alih fungsi lahan.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif [16][17][18]. Metode tersebut dipilih untuk menjelaskan dan mengetahui permasalahan sesuai situasi dan kondisi yang ada sehingga hasil penelitian fokus dan sesuai dengan judul penelitian [13]. Jenis penelitian ini masuk ke dalam jenis penelitian studi kasus [13]. Metode pada penelitian ini mencakup metode pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

Tabel 1. Kriteria Informan

No.	Informan	Status	Kriteria	Peran	Informasi
1.	A, B, C, O	Kepala dan Staf Kantor Pelabuhan (KSOP Kelas II Patimban)	Informan Kunci Utama	Pelaksana pembebasan lahan dan pembangunan Pelabuhan Patimban	Perencanaan pembebasan lahan dan pembangunan Pelabuhan Patimban
2.	D	Pimpinan Proyek Pengadaan Lahan	Informan Kunci Utama	Pelaksana pembebasan lahan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban	Proses pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban
3.	E	Pimpinan Proyek Pembangunan Area Darat	Informan Kunci Utama	Pelaksana pembangunan area daratan Pelabuhan Patimban	Proses pembangunan area darat Pelabuhan Patimban
4.	H	Camat Pusanagara	Informan	Panitia pembebasan lahan, pemimpin di tingkat kecamatan	Pendukung proses pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban
5.	G	Kepala Desa Patimban	Informan	Panitia pembebasan lahan, pemimpin di tingkat desa	Pendukung proses pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban
6.	P	Ketua Paguyuban Petani	Informan Kunci Utama	Ketua paguyuban petani/ ketua kelompok masyarakat petani terdampak alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban	Proses alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan Pelabuhan Patimban dan dampaknya terhadap mata pencaharian petani Desa Patimban
7.	J, K, L, M, N	Petani di Desa Patimban/ Anggota Paguyuban Petani	Informan Kunci Utama	Petani/ anggota paguyuban petani yang merupakan masyarakat terdampak alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban	Proses alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan Pelabuhan Patimban dan dampaknya terhadap mata pencaharian petani Desa Patimban
8.	F	Pemerintah Kabupaten Subang	Informan	Panitia pembebasan lahan, perwakilan di tingkat kabupaten	Pendukung proses pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban
9.	I	Dinas Pertanian Kabupaten Subang	Informan	Panitia pembebasan lahan, perwakilan di dinas pertanian kabupaten	Pendukung proses pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban

Sumber: hasil analisis, 2021

2.1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (studi kepustakaan) [1][19]. Teknik wawancara mendalam dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada pertanyaan penelitian dan membahasnya secara mendalam. Proses pemilihan informan dilakukan dengan mengidentifikasi informan yang terkait alih fungsi lahan [12] pembangunan Pelabuhan Patimban. Pihak-pihak yang terkait dicari dan diidentifikasi oleh peneliti untuk dijadikan sebagai informan. Dalam penelitian ini, informan yang dipilih didasarkan pada kategori berupa informan kunci utama dan informan [13] dengan jumlah keseluruhan sebanyak 16 informan. Informan kunci utama antara lain Kepala dan Staf Kantor Pelabuhan Patimban, Pimpinan Proyek (PPK) Pengadaan Lahan Pembangunan Pelabuhan Patimban, Pimpinan Proyek (PPK) Pembangunan Area Darat Pelabuhan Patimban, Ketua Paguyuban Petani, dan Para Petani/ Anggota Paguyuban Petani

Terdampak Alih Fungsi Lahan Pembangunan Pelabuhan Patimban. Sedangkan informan terdiri dari Camat Pusanagara, Kepala Desa Patimban, Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dan Perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Subang. Unit analisis pada penelitian ini yaitu individu/masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani terdampak alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan studi kepustakaan [19] berupa Dokumen Rencana Pembebasan Lahan/ *Land Acquisition and Resettlement Action Plan* (LARAP) Pelabuhan Patimban [8], Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.136/Menlhk/Setjen/PLA4/2/2017 [20], Dokumen *Environmental and Social Consideration* Pembangunan Pelabuhan Patimban, dan Data BPS Kabupaten Subang [9].

Tabel 2. Metode Pengumpulan Data

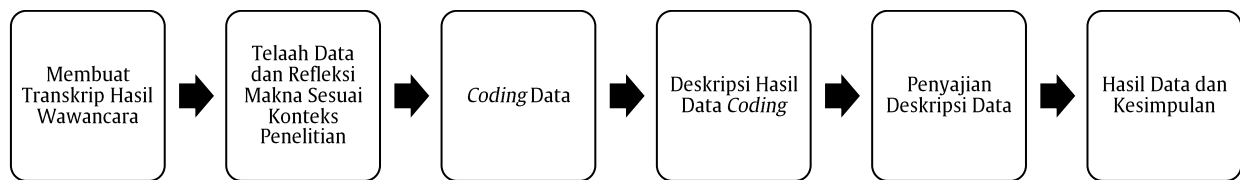
No.	Konsep Pertanyaan Penelitian	Hasil/ Output	Metode Pengumpulan Data
1.	Mengapa proses alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban berdampak pada keberlanjutan mata pencaharian petani di sekitarnya?	- Data dan informasi proses alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban. - Informasi dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap keberlanjutan mata pencaharian masyarakat sebagai petani.	- Wawancara, observasi, dan dokumentasi. - Dokumen perencanaan terkait (Dokumen LARAP, Izin Lingkungan, dan Data BPS)
2.	Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberlanjutan mata pencaharian petani di sekitarnya?	- Data dan informasi terkait faktor-faktor alih fungsi lahan pertanian yang mempengaruhi keberlanjutan mata pencaharian masyarakat sebagai petani.	- Wawancara, observasi, dan dokumentasi.
3.	Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk menciptakan keberlanjutan mata pencaharian petani yang terkena dampak alih fungsi lahan?	- Informasi solusi mengurangi dampak sosial alih fungsi lahan pertanian terhadap keberlanjutan mata pencaharian petani. - Proyeksi hasil / output dari solusi yang dilakukan.	- Wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sumber: hasil analisis, 2021

Tabel 3. Metode Wawancara

No.	Status Informan	Konsep Pertanyaan Wawancara
1.	- Kepala Pelabuhan Patimban - Pimpinan Proyek (PPK) Pengadaan Lahan - Pimpinan Proyek (PPK) Pembangunan Area Darat - Camat Pusanagara - Kepala Desa Patimban - Pemerintah Kabupaten Subang - Dinas Pertanian Kabupaten Subang	- Apakah sudah dikaji dampak sosial alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap keberlanjutan mata pencaharian penduduk sekitar khususnya petani? - Apakah sudah dilakukan proses sosialisasi sebelum dilakukan alih fungsi lahan dan pembangunan Pelabuhan Patimban kepada masyarakat setempat khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani? - Bagaimana dengan proses pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban yang selama ini sudah dilakukan? - Apa yang menjadi keluhan masyarakat petani yang lahan pertaniannya terkena pembebasan lahan? - Apa yang menjadi prioritas utama untuk menjaga keberlanjutan mata pencaharian petani yang terdampak alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban? - Apa solusi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi dampak alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap keberlanjutan mata pencaharian petani di sekitarnya?
2.	- Ketua Paguyuban Petani - Petani di Desa Patimban (Anggota Paguyuban Petani)	- Apakah lahan pertanian yang Anda kelola milik sendiri atau orang lain? - Apakah lahan pertanian yang Anda kelola terkena pembebasan lahan secara keseluruhan atau sebagian? - Bagaimana dengan proses ganti rugi lahan yang selama ini Anda rasakan? - Apakah alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan Pelabuhan Patimban berdampak terhadap keberlanjutan mata pencaharian Anda sebagai petani? - Apa ada tawaran dari Pemerintah untuk mengganti lahan pertanian yang terkena pembebasan lahan di lokasi lain? - Apakah para petani yang terkena dampak pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban akan ditampung bekerja di Pelabuhan Patimban oleh pemerintah? - Apabila Anda sudah tidak bekerja sebagai petani karena lahan pertanian telah dialihfungsikan untuk pembangunan Pelabuhan Patimban, profesi apa yang akan Anda jalani nantinya? - Apakah perubahan mata pencaharian yang akan terjadi berdampak sosial pada kehidupan Anda?

Sumber: hasil analisis, 2021



Sumber: hasil analisis, 2021

Gambar 3. Alur Teknik Pengolahan Data

2.2. Pengolahan Data

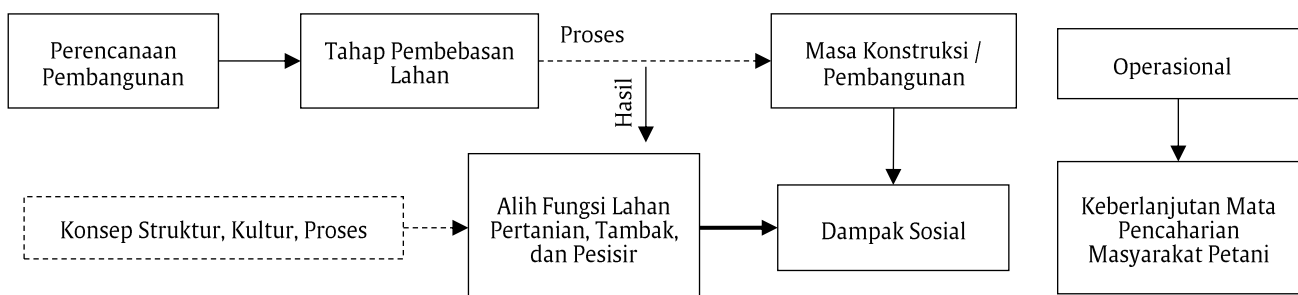
Penelitian ini menggunakan metode observasi nonpartisipan, di mana peneliti mengamati aktivitas dan mencatat beberapa hal yang berkaitan dengan proses penelitian [10]. Hasil transkrip wawancara berupa kata-kata tertulis bersifat deskriptif berasal dari informan [11]. Tahapan teknik pengolahan data: membuat transkrip hasil wawancara, menelaah data dan merefleksikan makna sesuai konteks penelitian, *coding* data, mendeskripsikan hasil data *coding*, penyajian hasil deskripsi data, dan mengemukakan hasil data dan kesimpulan [15].

2.3. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data dan informasi yang telah diperoleh sesuai isu penelitian. Data primer dianalisis dengan membuat matriks wawancara dari tiap informan [16][17]. Hasil wawancara dikategorikan ke dalam matriks wawancara. Kemudian dilakukan elaborasi data dan informasi dengan merepresentasikan hasilnya ke konsep struktur-kultur-proses [21]. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi untuk menyesuaikan data dan informasi dengan mengkaji dari dokumen terkait, yang meliputi dokumen perencanaan, data statistik, buku, situs web, dan sumber lain terkait pembangunan Pelabuhan Patimban. Perbedaan data dan informasi yang diperoleh dari tiap informan

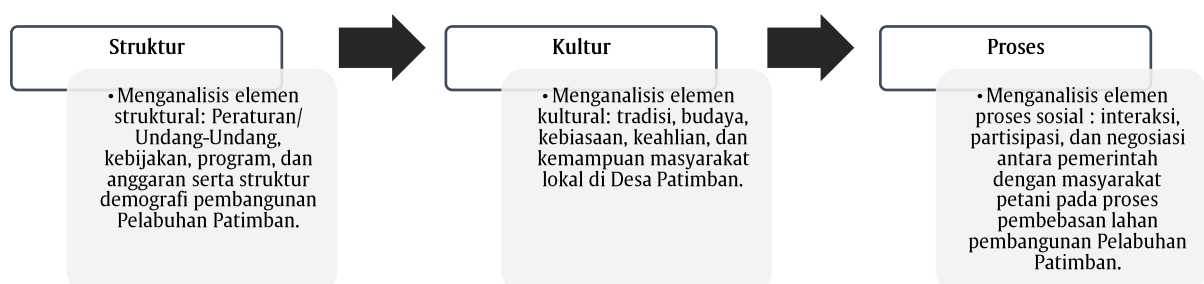
kemudian diperiksa kembali dengan data primer dan data sekunder yang ada.

Sesuai konsep pembangunan sosiologis, membangun manusia harus dengan membangun unsur-unsur dasar masyarakatnya, yaitu struktur, kultur dan proses sosial [22]. Struktur sosial merupakan pola hubungan antara kekuasaan dengan kelompok sosial dalam bentuk stratifikasi, komposisi, dan diferensiasi sosial [22]. Kultur merupakan semua hal yang mencakup sistem nilai, norma, kepercayaan, kebiasaan, dan adat istiadat suatu individu atau masyarakat yang mendarah daging (*internalized*) sehingga memiliki kekuatan membentuk pola perilaku dan sikap masyarakat [22]. Proses sosial merupakan semua hal terkait dinamika interaksi antarmasyarakat yang belum terstruktur (*structured*) maupun mengkultur (*cultured*) [22]. Pada tahap struktur, penelitian ini menganalisis elemen struktural seperti Peraturan/Undang-Undang, kebijakan, program, dan anggaran serta struktur demografi pembangunan Pelabuhan Patimban [21]. Tahap kultur menganalisis elemen kultural seperti tradisi, budaya, kebiasaan, keahlian, dan kemampuan masyarakat lokal di Desa Patimban [21]. Tahap proses menganalisis elemen proses sosial seperti interaksi, partisipasi, dan negosiasi antara pemerintah dengan masyarakat petani pada proses pembebasan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban [21].



Sumber: hasil analisis, 2021

Gambar 4. Alur Kerangka Teori



Sumber : [21] dan hasil analisis, 2021

Gambar 2. Tahapan Analisis Struktur, Kultur, Proses

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian dilakukan di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data BPS Kabupaten Subang Tahun 2018, terdapat empat Dusun dan lima Rukun Warga di Desa Patimban [9]. Desa Patimban memiliki wilayah yang paling luas dari seluruh desa di Kecamatan Pusakanagara. Jenis mata pencaharian dominan penduduk di Desa Patimban adalah pada sektor pertanian (petani tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan buruh tani), dengan tingkat pendidikan mayoritas berada di level SD ke bawah [9]. Komposisi mata pencaharian dan tingkat pendidikan penduduk Desa Patimban dapat dilihat pada tabel 4.

Lingkup pekerjaan pembangunan pelabuhan Patimban terdiri dari pembangunan backup area, jalan akses, dan pembangunan area sisi laut. Sebagian besar kawasan backup area secara administratif terletak di Desa Patimban, Kecamatan Pusakanagara. Sedangkan jalan akses lokasinya melalui beberapa desa, antara lain Desa Patimban, Desa Gempol, Desa Kalentambo, Desa Pusaka Ratu, dan Desa Kota Sari yang masuk di Kecamatan Pusakanagara, dan Desa Pusaka Jaya, Kecamatan Pusaka Jaya. Proses pelaksanaan pengadaan lahan dilakukan dengan cara membebaskan lahan sawah, tambak, dan sebagian kecil pemukiman atau lahan yang terbangun milik masyarakat [8]. Tiga area yang dibangun tersebut

Tabel 6. Jenis Kondisi Lahan Eksisting Lokasi Backup Area Pelabuhan

No.	Jenis Kondisi Lahan	Luas Lahan (Ha)
1.	Irigasi	1,0
2.	Jalan	3,42
3.	Pemukaman	0,53
4.	Ladang	18,62
5.	Lahan Terbangun	8,77
6.	Padang Rumput	2,62
7.	Sawah	207,33
8.	Sungai	0,79
9.	Tambak	113,13
Luas Total		356,23

Sumber: [8]

memiliki spesifikasi, luasan, dan kondisi sesuai dengan tabel 5.

Dari jumlah total rencana luas lahan yang dibebaskan pada saat dilakukan wawancara mendalam, progres pengadaan lahan telah mencapai sekitar *85%. Kondisi lahan pada lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban sebagian besar merupakan lahan pertanian, tambak, serta sarana dan prasarana pertanian [8]. Berikut kondisi penggunaan lahan eksisting di lokasi pembangunan *backup area* Pelabuhan Patimban (tabel 6).

Status kepemilikan lahan persawahan di Desa Patimban dimiliki oleh perorangan dan tanah kas desa (TKD) atau tanah bengkok. Sedangkan status kepemilikan lahan tambak di Desa Patimban dimiliki

Tabel 4. Komposisi Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Patimban

Komposisi Mata Pencaharian			Tingkat Pendidikan		
No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tanaman Pangan	359	1.	Tidak / Belum Tamat SD	1.973
2.	Perkebunan	0	2.	SD	1.850
3.	Kehutanan	0	3.	SMP	493
4.	Peternakan	6	4.	SMA	258
5.	Perikanan	12	5.	Diploma (I/II)	0
6.	Buruh Tani	1.387	6.	Akademi (DIII)	18
7.	Penggalan	2	7.	Perguruan Tinggi (≥ DIV/S1)	20
8.	Industri	21			
9.	Listrik, Gas, dan Air	12			
10.	Bangunan	29			
11.	Perdagangan	655			
12.	Angkutan	63			
13.	Keuangan	5			

Sumber: [9]

Tabel 5. Area, Spesifikasi, dan Luasan, serta Kondisi Lahan Eksisting Patimban

No.	Area	Spesifikasi dan Luasan		Kondisi Lahan Eksisting
1.	Backup Area Pelabuhan	Luas Tahap Awal	: 250 Ha	Sawah/ tegalan, tambak ikan, dan sebagian kecil pemukiman
		Luas Total Lahan Rencana	: $\pm$ 356,23 Ha	
2.	Jalan Akses Pelabuhan	Panjang Jalan	: $\pm$ 5 Km	Sawah/ tegalan, tambak ikan, dan sebagian kecil pemukiman
		Lebar Jalan	: 30 meter	
3.	Area Sisi Laut Pelabuhan	Luas Total Lahan Rencana	: $\pm$ 15,79 Ha	Perairan/laut
		Kedalaman Alur Laut Minimal	: -17 mLWS	
		Jenis Konstruksi	: Reklamasi	
		Luas Total Rencana	: $\pm$ 301 Ha	

Sumber: [8]



Sumber: [8]

Gambar 4. Peta Sebaran Luasan Pembebasan Lahan Back Up Area Pelabuhan Patimban

oleh perorangan dan perusahaan swasta [8]. Bentuk pilihan ganti rugi lahan warga terkena dampak (WTD) pada proses pengadaan lahan pembangunan pelabuhan Patimban sesuai dengan tabel 7.

Dalam pelaksanaan pengadaan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban terhadap lahan sawah dan tambak milik masyarakat, sebagian besar warga terkena dampak menginginkan ganti rugi dalam bentuk uang.

“Kalau tanah warga semuanya diganti rugi dengan uang. Ya kalau “bengkok” desa itu diganti dengan tanah juga yang senilai. Bukan luasnya ya, tapi senilai.” [Wawancara Informan D, 2021]

Perhitungan ganti rugi dalam bentuk uang ditetapkan berdasarkan harga pasaran tanah di lokasi tersebut, sesuai penilaian Konsultan Jasa Penilai Publik (KJPP). Penentuan besaran nilai ganti kerugian per bidang tanah dihitung berdasarkan tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, dan kerugian lain yang dapat dinilai [8].

Tabel 7. Proses dan Pilihan Bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Lahan Patimban

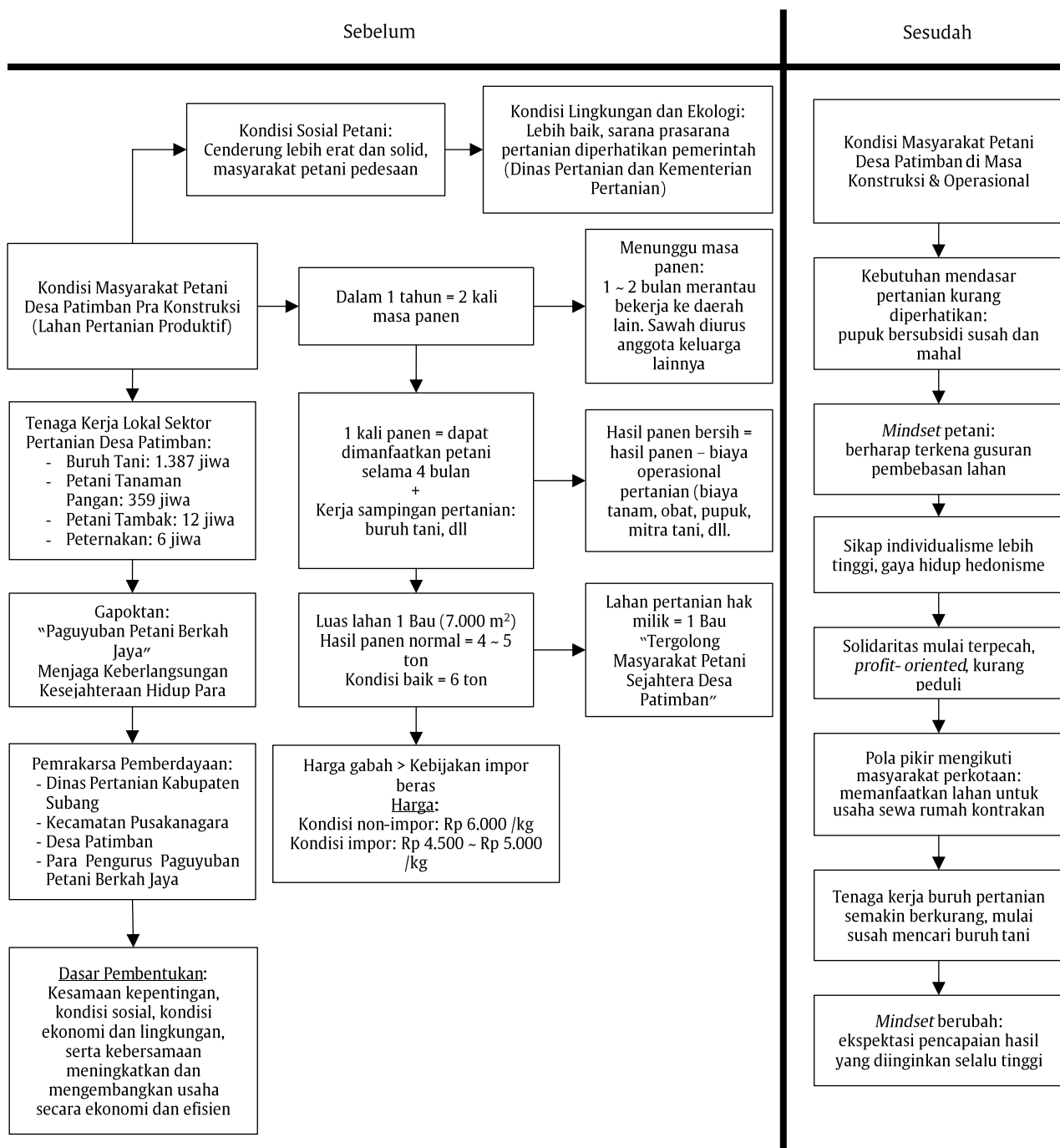
No.	Proses Ganti Rugi Lahan	Pilihan Bentuk Ganti Kerugian
1.	Bentuk Ganti Kerugian yang Dimusyawarahkan	a. Uang b. Tanah Pengganti c. Permukiman Kembali d. Kepemilikan Saham e. Bentuk lain yang disetujui kedua belah pihak (gabungan dari 2 atau lebih bentuk ganti kerugian)
2.	Bentuk Opsi Lain	a. Pertukaran lahan dengan luas dan produktivitas yang sama seperti di lokasi asal b. Perumahan Sederhana c. Rumah Susun d. Opsi-opsi lainnya

Sumber: [8]

3.1. Kondisi Dampak Sosial Masyarakat Petani Desa Patimban Sebelum dan Setelah Alih Fungsi Lahan

Sebelum ada alih fungsi lahan di Desa Patimban, dalam setahun petani rata-rata memperoleh dua kali masa panen. Petani pemilik lahan dengan luas 1 bau (1 bau = 7000 m²) memperoleh hasil panen rata-rata empat sampai lima ton gabah, yang menjadi andalan utama pemenuhan hidup keluarga petani dan dapat dimanfaatkan selama empat bulan. Selain itu, petani bekerja sampingan sebagai buruh tani dan lain-lain. Jika kondisi hasil pertanian sedang baik, petani dapat memperoleh panen seberat enam ton. Fluktuasi harga gabah di pasaran dipengaruhi oleh kebijakan impor beras pemerintah. Jika tidak ada impor, harga gabah di pasaran mencapai Rp 6.000 per kg. Namun dalam kondisi impor, harga gabah berkisar antara Rp 4.500 hingga Rp 5.000 per kg. Dengan kepemilikan luas lahan minimal 1 bau, petani di Desa Patimban tergolong ke dalam masyarakat petani sejahtera karena bisa membiayai hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Hasil panen petani bukan merupakan penghasilan bersih karena belum dikurangi biaya tanam, obat, pupuk, mitra tani, dan lain-lain. Sambil menunggu masa panen, selama satu sampai dua bulan para petani meninggalkan sawahnya untuk bekerja merantau ke daerah lain. Sawah yang tinggal menunggu masa panen diurus oleh anggota keluarga petani. Kondisi sosial para petani sebelum adanya alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban cenderung lebih erat dan solid dalam masyarakat petani pedesaan. Kondisi lingkungan dan ekologi pertanian juga lebih baik karena Dinas Pertanian dan Kementerian Pertanian sangat memperhatikan kondisi sarana prasarana pertanian [Wawancara Informan P, 2021].

Alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban membuat kebutuhan mendasar pertanian di Desa Patimban kurang diperhatikan, salah satunya pupuk bersubsidi semakin susah dan mahal didapatkan. Mindset masyarakat petani di Desa Patimban saat ini berubah, berharap terkena gusuran pembebasan lahan. Masyarakat petani cenderung memiliki sikap individualis yang lebih tinggi dan memiliki gaya hidup hedonisme. Solidaritas masyarakat petani di Desa Patimban saat ini pun sudah mulai terpecah, *profit-oriented*, dan kurang peduli. Pola pikirnya pun cenderung berubah komersial mengikuti masyarakat perkotaan, dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk usaha sewa rumah kontrakan. Hal tersebut membuat tenaga kerja (buruh) di sektor pertanian semakin berkurang sehingga saat ini sudah mulai susah untuk mencari buruh tani. Mindset masyarakat petani yang berubah membuat ekspektasi pencapaian hasil yang diinginkan selalu tinggi [Wawancara Informan P, 2021].



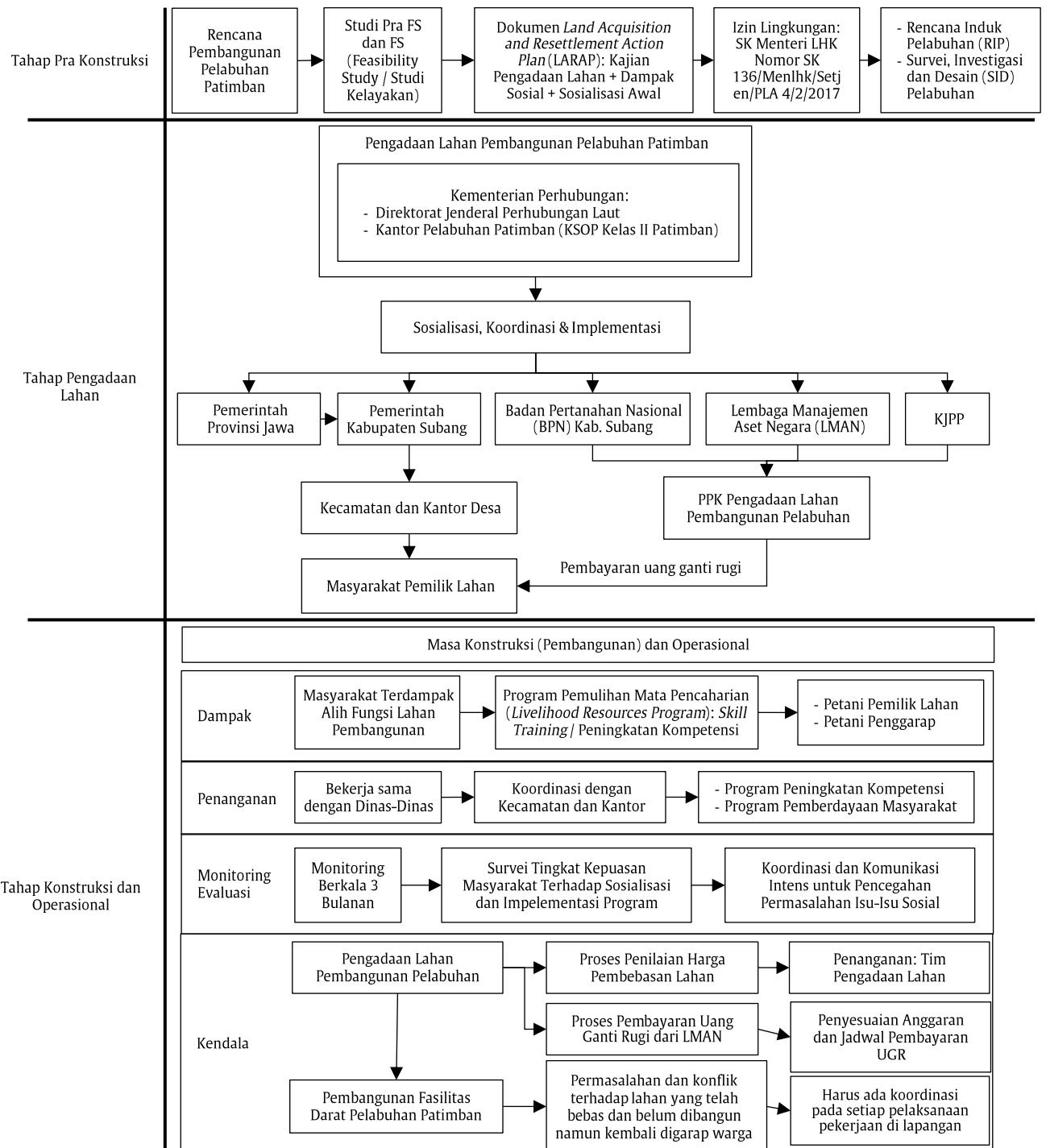
Sumber: hasil analisis, 2021

Gambar 4. Alur Kerangka Teori

3.2. Struktur Kebijakan Pemerintah pada Proses Pembangunan Pelabuhan Patimban

Perencanaan pembangunan Pelabuhan Patimban dimulai dari tahap prakonstruksi, pengadaan lahan, hingga tahap konstruksi dan operasional. Tahap prakonstruksi dilakukan dengan menyiapkan dokumen perencanaan berupa Studi Pra FS dan FS (feasibility study/ studi kelayakan), Dokumen Rencana Pembebasan Lahan atau LARAP [8], Dokumen Lingkungan atau Amdal (sesuai izin lingkungan: SK Menteri LHK Nomor SK 136/Menlhk/Setjen/PLA.4/2/2017) [20], Dokumen Teknis berupa Rencana Induk Pelabuhan (RIP) serta Survei Investigasi dan Desain (SID) Pelabuhan.

Sosialisasi mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat diantisipasi dengan pendekatan aparat pemerintah daerah bersama tokoh-tokoh masyarakat setempat [Wawancara Informan A, 2021]. Pendataan dilakukan terhadap masyarakat petani terdampak alih fungsi lahan untuk pelaksanaan program pemulihan mata pencaharian (*livelihood resources program*) berupa *skill training* atau peningkatan kompetensi [Wawancara Informan C, 2021]. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat lokal dilaksanakan dengan menempatkan tenaga ahli terampil maupun tenaga tidak terampil untuk bekerja di pelabuhan [Wawancara Informan O, 2021].



Sumber: hasil analisis, 2021

Gambar 6. Struktur Kebijakan pada Proses Pembangunan Pelabuhan Patimban

Monitoring berkala (tiap tiga bulan) dilakukan dengan melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terkait sosialisasi dan implementasi program sebagai upaya pencegahan permasalahan isu-isu sosial di masyarakat [Wawancara Informan C, 2021]. Pelatihan-pelatihan kepada masyarakat setempat diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Subang agar SDM lokal dapat menjadi tenaga terampil [Wawancara Informan O, 2021]. Penyerapan tenaga kerja lokal pada pembangunan fasilitas darat Pelabuhan Patimban sekitar 10% [Wawancara Mendalam Si E, 2021]. Kendala pengadaan lahan diatasi oleh tim pengadaan lahan.

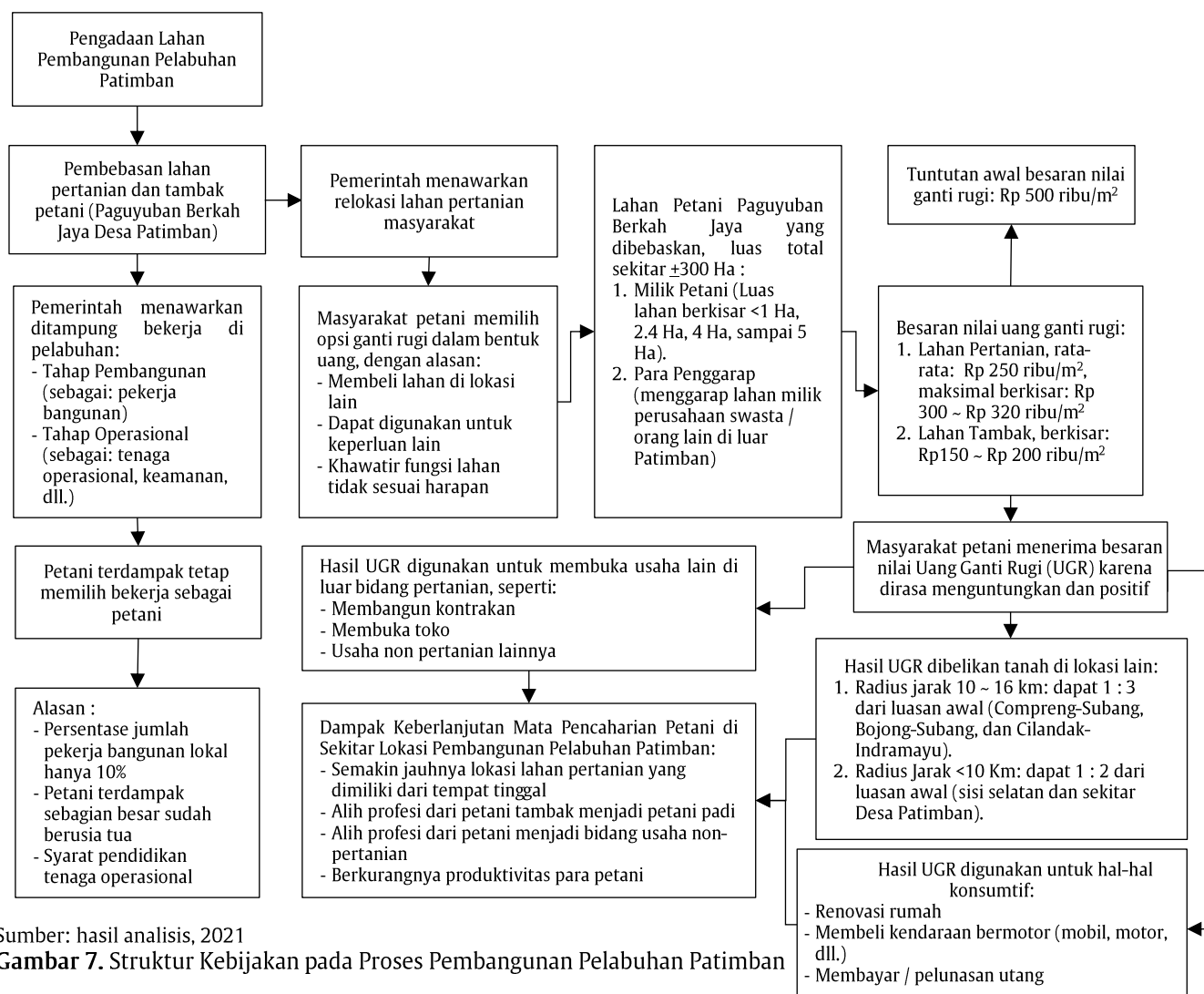
Hambatan pengadaan lahan meliputi evaluasi administrasi per bidang tanah dan adanya pemotongan anggaran di LMAN sehingga proses pembayaran ganti rugi menjadi terlambat [Wawancara Mendalam Si C, 2021]. Kendala pembangunan fasilitas darat yaitu adanya konflik dengan masyarakat yang tetap menggarap di lahan yang telah dibebaskan. Untuk mengatasinya, harus dilakukan koordinasi setiap pelaksanaan pekerjaan pembangunan di lapangan [Wawancara Informan E, 2021].

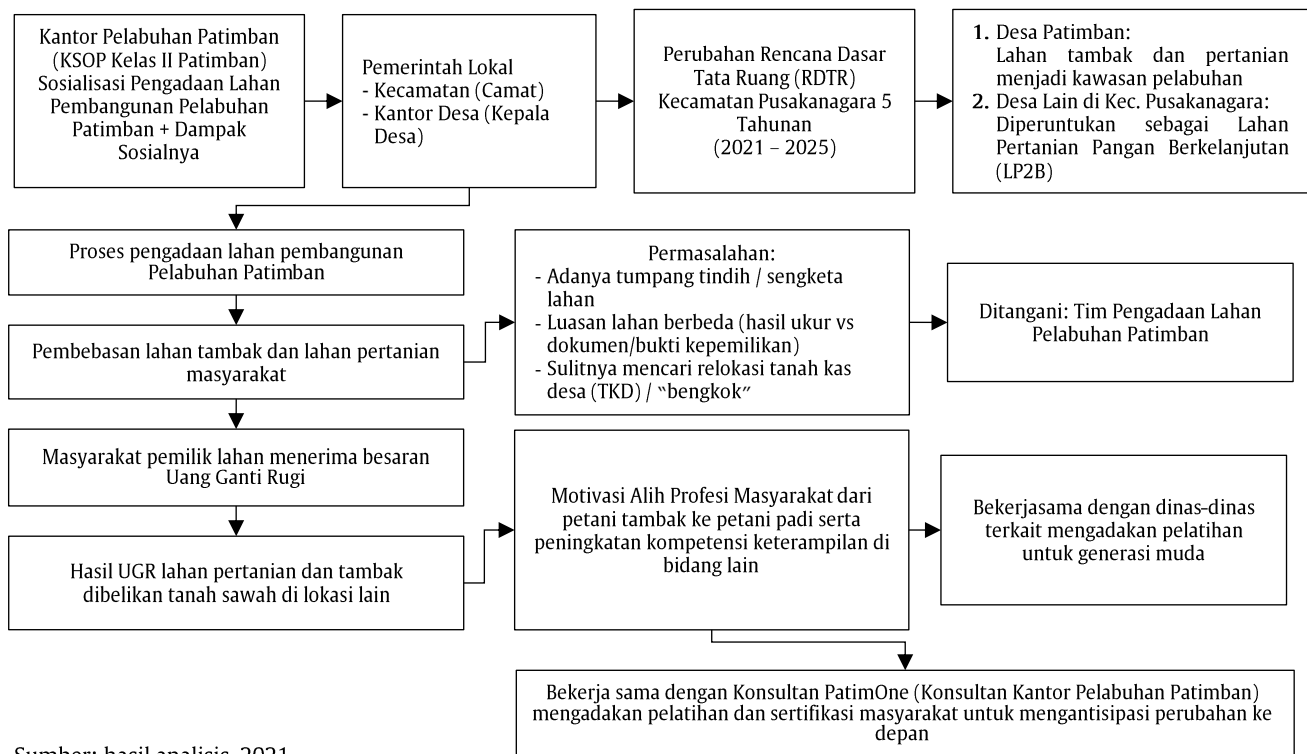
3.3. Kultur Masyarakat Petani Desa Patimban Terdampak Alih Fungsi Lahan

Dalam pengadaan lahan pembangunan Pelabuhan Patimban diperlukan langkah membebaskan lahan pertanian dan tambak milik masyarakat, tanah kas desa “bengkok”, dan perusahaan swasta. Para petani terdampak pembebasan lahan di Patimban tergabung dalam Paguyuban Petani Berkah Jaya. Pada proses pembebasan lahan, pemerintah menawarkan penggantian/ relokasi lahan pertanian masyarakat di lokasi lain. Namun, masyarakat memilih opsi ganti rugi dalam bentuk uang untuk dimanfaatkan membeli lahan di lokasi lain dan dapat digunakan untuk keperluan lainnya [Wawancara Informan P, 2021]. Tawaran relokasi lahan ditolak masyarakat karena khawatir tidak sesuai dengan harapan masyarakat petani [Wawancara Informan J, 2021]. Besaran nilai ganti rugi lahan pertanian rata-rata sebesar Rp 250 ribu/m² dan paling tinggi berkisar antara Rp 300 ribu/m² sampai dengan Rp 320 ribu/m². Sementara itu, lahan tambak berkisar antara Rp 150 ribu/m² sampai dengan Rp 200 ribu/m² [Wawancara Informan P, 2021]. Masyarakat petani merasa proses ganti rugi lahan menguntungkan dan positif [Wawancara Informan J, K, L, M, dan P, 2021].

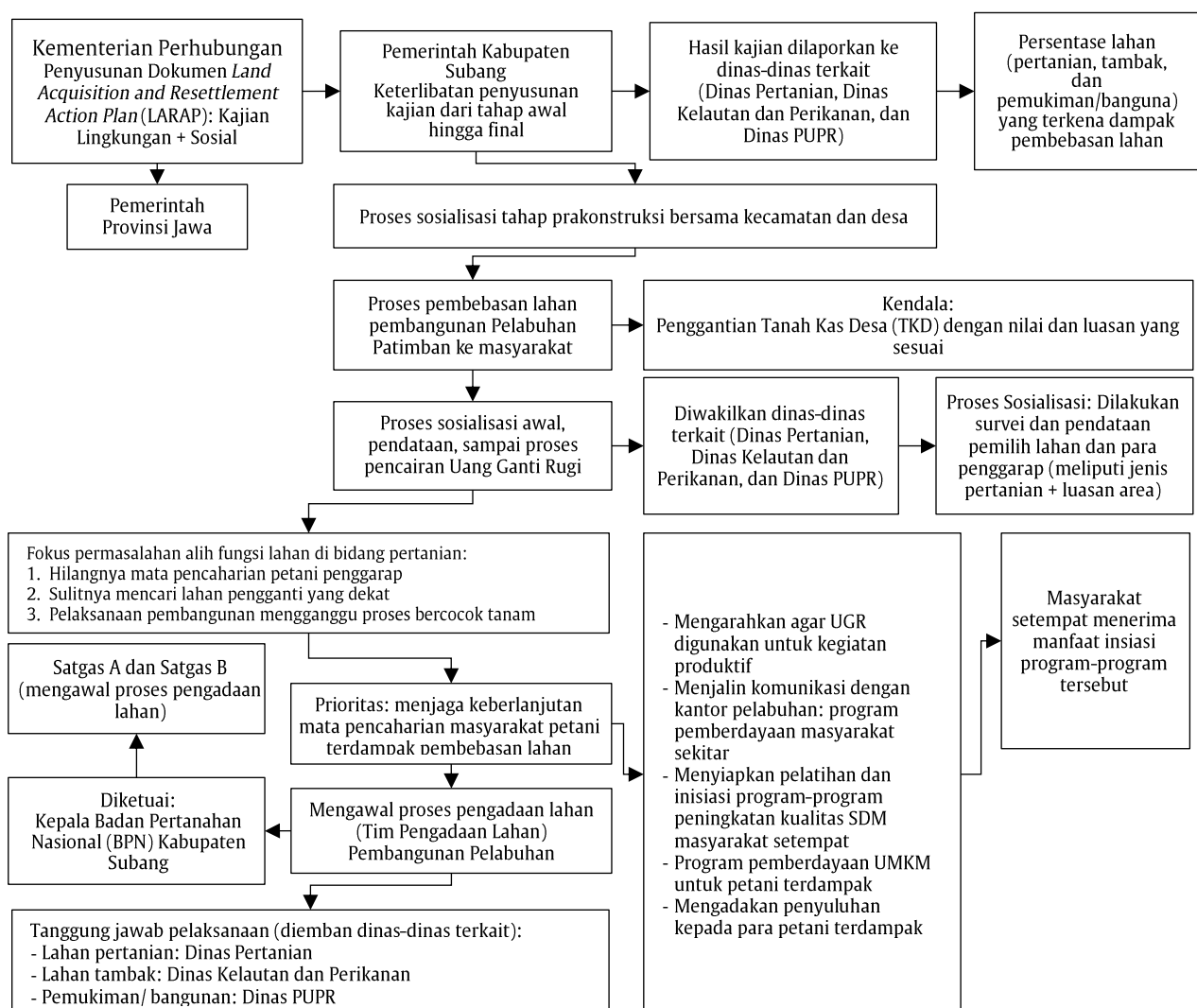
Hasil uang ganti rugi digunakan untuk membeli lahan pertanian yang berjarak 10 hingga 16 Km dari lokasi Desa Patimban, yaitu di Compreng-Subang, Bojong-Subang, Cilandak-Indramayu, dan lokasi lain di Indramayu [Wawancara Informan J, K, L, dan N]. Hasil pembebasan 1 Ha lahan pertanian dapat dibeli 2 sampai 3 Ha lahan pertanian di lokasi lain [Wawancara Informan J dan K, 2021].

Pemerintah menawarkan ke masyarakat petani terdampak pembebasan lahan untuk ditampung bekerja di proyek pembangunan Pelabuhan Patimban, namun petani tetap memilih bekerja sebagai petani [Wawancara Informan M, 2021]. Persentase jumlah masyarakat lokal yang dapat ditampung pada proyek pembangunan Pelabuhan Patimban hanya sebesar 10% [Wawancara Informan K, 2021]. Kebutuhan tenaga operasional pelabuhan memiliki syarat pendidikan minimal SMA dan S1/sarjana. Hal tersebut membuat para petani tidak dapat bekerja sebagai tenaga operasional pelabuhan karena tingkat pendidikan yang rendah [Wawancara Informan J, 2021]. Banyaknya para petani terdampak yang sudah berusia tua membuat mereka tidak dapat bekerja di pelabuhan [Wawancara Mendalam Si P, 2021].





Gambar 8. Proses Interaksi Sosial Pengadaan Lahan Pembangunan Pelabuhan Patimban



Gambar 9. Proses Kerja sama Pengadaan Lahan Pembangunan Pelabuhan Patimban

3.4. Prosesual Alih Fungsi Lahan Pembangunan Pelabuhan Patimban

Proses adalah segala dinamika interaksi yang belum terstruktur maupun mengkultur [22]. Dalam komponen prosesual terdapat beberapa konsep antara lain interaksi sosial, kerja sama, sosialisasi, negosiasi, konflik [22]. Terdapat beberapa komponen prosesual yang terjadi pada kajian ini, meliputi interaksi sosial, yakni antara Kantor Pelabuhan Patimban (KSOP Kelas II Patimban) selaku perwakilan pemerintah pusat dengan pemerintah di tingkat lokal (Kecamatan Pusakanagara dan Desa Patimban) serta masyarakat (petani) pemilik lahan yang terkena pembebasan. Komponen prosesual selanjutnya berupa kerja sama antar-pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam hal ini kerja sama intens antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Subang.

4. Kesimpulan

Kondisi sosial para petani sebelum adanya alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban cenderung lebih erat dan solid dalam masyarakat petani pedesaan, dengan kondisi lingkungan dan ekologi pertanian yang lebih baik karena *stakeholder* terkait sangat memperhatikan kondisi sarana prasarana pertanian. Alih fungsi lahan pembangunan Pelabuhan Patimban membuat kebutuhan mendasar pertanian kurang diperhatikan dan mengubah mindset masyarakat petani. Dampak lainnya adalah sikap individualisme yang cenderung lebih tinggi dan gaya hidup hedonisme. Solidaritas masyarakat petani yang mulai terpecah, *profit-oriented*, dan kurang peduli membuat pola pikir mereka menjadi komersial mengikuti masyarakat perkotaan. Perubahan mindset masyarakat petani membuat ekspektasi pencapaian hasil yang diinginkan selalu tinggi.

Di lingkup struktur, tahap pra konstruksi dan pengadaan lahan diidentifikasi proses yang berjalan sehingga upaya yang dilakukan pada tahap konstruksi/ operasional untuk mengurangi dampak alih fungsi lahan adalah dengan "Program Pemulihan Mata Pencapaian (*Livelihood Resources Program*)" berupa *Skill Training*/ Peningkatan Kompetensi. Pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan berkoordinasi dan bekerja sama dengan *stakeholder* di lingkup pemerintah daerah. Monitoring berkala (tiap 3 bulan) dilakukan dengan melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat terkait sosialisasi dan implementasi program sebagai upaya pencegahan permasalahan isu-isu sosial. Kendala-kendala yang ada diatasi oleh tim yang telah dibentuk dan koordinasi dilakukan pada tiap proses pelaksanaan di lapangan. Di lingkup kultur, identifikasi dampak terhadap keberlanjutan mata pencaharian petani di sekitar lokasi pembangunan Pelabuhan Patimban berupa semakin jauhnya lokasi lahan pertanian yang

dimiliki dari tempat tinggal, alih profesi dari petani tambak menjadi petani padi, alih profesi dari petani menjadi pekerja di bidang usaha non-pertanian, dan berkurangnya produktivitas para petani.

Komponen prosesual berupa interaksi sosial antara Kantor Pelabuhan Patimban (KSOP Kelas II Patimban) selaku perwakilan pemerintah pusat dengan pemerintah di tingkat lokal (Kecamatan Pusakanagara dan Desa Patimban) serta masyarakat (petani) pemilik lahan yang terkena pembebasan adalah motivasi alih profesi masyarakat dari petani tambak ke petani padi serta peningkatan kompetensi keterampilan di bidang lain yang bekerja sama dengan *stakeholder* terkait. Sedangkan komponen prosesual selanjutnya berupa kerja sama antar-pemerintah yaitu kerja sama intens antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Subang dengan melaksanakan program prioritas menjaga keberlanjutan mata pencaharian masyarakat petani terdampak pembebasan lahan, antara lain mengarahkan agar hasil UGR digunakan untuk kegiatan produktif, menjalin komunikasi untuk program pemberdayaan masyarakat sekitar, menyiapkan pelatihan dan inisiasi program-program peningkatan kualitas SDM masyarakat setempat, mengadakan program pemberdayaan UMKM untuk petani terdampak, dan mengadakan penyuluhan kepada para petani terdampak.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kepala Kantor, PPK, dan Staf Kantor KSOP Kelas II Patimban, Perwakilan Setda dan Dinas Pertanian Kabupaten Subang, Camat Pusakanagara, Kepala Desa Patimban, dan Paguyuban Petani Berkah Jaya Desa Patimban atas kesediaannya memberikan informasi, serta Dosen Pascasarjana Sosiologi FISIP UI yang telah membimbing dalam penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Bambang Iryana, " Analisis Dampak Pembangunan Pelabuhan Patimban di Kecamatan Pusakanegara Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar," J. Caraka Prabu, vol. 2, no. 1, pp. 21– 40, Jun. 2018, doi: 10.36859/JCP.V2I1.398.
- [2] H. Hikmat, "Analisis Dampak Lingkungan Sosial : Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (*People Centred Development*)", Jakarta: Andalsos : Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI. 2000.
- [3] R. Syahra, " Eksklusi Sosial: Perspektif Baru Untuk Memahami Deprivasi dan Kemiskinan," J. Masy. dan Budaya, vol. 12, no. 3, pp. 1– 34, 2010, doi: 10.14203/JMB.V12I3.149.
- [4] A. Suherman and D. A. Dault, " Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pengembangan Jembrana Bali," Saintek Perikan. Indones. J. Fish. Sci.

- Technol., vol. 4, no. 2, pp. 24– 32, Jul. 2011, doi: 10.14710/IJFST.4.2.24-32.
- [5] “ Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional [JDIH BPK RI],” Jan. 12, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38201/perpres-no-3-tahun-2016>.
- [6] “ Peraturan Presiden No. 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat sebagai Proyek Strategis Nasional [JDIH BPK RI],” JDIH BPK RI, May 25, 2016. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40432>.
- [7] Kementerian Perhubungan, “ Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 190 Tahun 2016 tentang Penetapan Dokumen Pra FS dan FS Pengembangan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat,” Kementerian Perhubungan, 2016. https://jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepmen/2016/KP_190_Tahun_2016.pdf.
- [8] Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, “ Rencana Tindak Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (LARAP) Pelabuhan Patimban Kabupaten Subang,” Kementerian Perhubungan, 2016. <https://www.scribd.com/document/435623047/RENCANA-TINDAK-PEMBEBASAN-LAHAN-pdf>.
- [9] Badan Pusat Statistik, “ Kabupaten Subang Kecamatan Pusakanagara Dalam Angka 2018,” Badan Pusat Statistik, Sep. 26, 2018. <https://subangkab.bps.go.id/publication/2018/09/26/39747f139c7ff23f76061265/kecamatan-pusakanagara-dalam-angka-2018.html>.
- [10] L. Kamarudin, C. Anwardan, and Y. Sading, “ Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali” J. Katalogis, vol. 4, no. 12, pp. 47– 55, 2006..
- [11] M. C. B. Umanailo, “ Marginalisasi Buruh Tani Akibat Alih Fungsi Lahan” , 11-Dec-2017. [Online]. Available: osf.io/xq96n.
- [12] E. . . Ante, N. M. Benu, and V. R. . Moniaga, “ Dampak Ekonomi dan Sosial Alih Fungsi Lahan Pertanian Hortikultura Menjadi Kawasan Wisata Bukit Rurukan Di Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon,” Agri-Sosioekonomi, vol. 12, no. 3, pp. 113– 124, Nov. 2016, doi: 10.35791/AGRSOSEK.12.3.2016.14058.
- [13] I. Andari, A. Suriadi, and R. H. Harahap, “ Analisis Perubahan Orientasi Mata Pencarian dan Nilai Sosial Masyarakat Pasca Alih Fungsi Lahan Persawahan Menjadi Lahan Industri,” Anthr. J. Antropol. Sos. dan Budaya (Journal Soc. Cult. Anthropol., vol. 4, no. 1, pp. 1– 8, Jul. 2018, doi: 10.24114/ANTRO.V4I1.9968.
- [14] A. Haris, L. B. Subagio, F. Santoso, and N. Wahyuningtyas, “ Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Karangwido Kecamatan Dau Kabupaten Malang,” Media Komun. Geogr., vol. 19, no. 1, pp. 114– 120, Jul. 2018, doi: 10.23887/MKG.V19I1.13967.
- [15] I. D. Pramudiana, “ Dampak Konversi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan,” Asketik J. Agama dan Perubahan Sos., vol. 1, no. 2, Feb. 2017, doi: 10.30762/ASK.V1I2.525.
- [16] SE. Zainab, “ Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Masyarakat Petani (Studi Kasus Desa Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, Malang),” J. Ilm. Mhs. FEB, vol. 5, no. 2, Aug. 2017. [Online]. Available: <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/4085>.
- [17] S. D. Kusdiane, E. Soetarto, and S. Sunito, “ Land Conversion and Changes in Agricultural Communities at Cimanuk Subdistrict, Pandeglang Regency,” Sodality J. Sociol. Pedesaan, vol. 6, no. 3, May 2018, doi: 10.22500/SODALITY.V6I3.23465.
- [18] Mochamad Najib, “ Komersialisasi Lahan Sawah dan Tambak Studi Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Sidoarjo,” Surabaya, Feb. 2018. [Online]. Available: <http://lib.unair.ac.id>.
- [19] I. A. Listiya Dewi, I. M. Sarjana, and N. L. M. Pradnyawathi, “ Dampak Sosial Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian Bagi Anggota Subak Kerdung di Kota Denpasar | JURNAL MANAJEMEN AGRIBISNIS (Journal Of Agribusiness Management),” J. Manaj. Agribisnis, vol. 04, no. 02, pp. 159– 169, Oct. 2016. [Online]. Available: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/agribisnis/article/view/27850>.
- [20] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, “ Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK 136/Menlhk/Setjen/PLA 4/2/2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Patimban ” . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017. https://www.jica.go.jp/english/our_work/social_environmental/id/asia/southeast/indonesia/c8h0vm00009ylvi7-att/c8h0vm0000b1ppo0.pdf.
- [21] W. Paulus. “Bahan Ajar : Mendefinisikan Pembangunan Sosial,”.
- [22] W. Paulus, “Mencari Makna Pembangunan Sosial: Studi Kasus Sektor Informal di Kota Solo,”. Depok: Masyarakat : *Jurnal Sosiologi*, Vol. 18, No. 1, Pp. 101– 120, Jan. 2013. doi: 10.7454/mjs.v18i1.3735